

HUBUNGAN PENERAPAN PSAP NOMOR 2 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN)

Submission date: 12-Mar-2019 01:28PM (UTC+0700)
by Nita Djuitaningsih

Submission ID: 1091916158

File name: B-15.pdf (393.57K)

Word count: 7129

Character count: 44265

1

HUBUNGAN PENERAPAN PSAP NOMOR 2 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN)

Tita Djuitaningsih

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie

Maulida Oktafani

Alumnus Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie

Abstract

The purpose of this study was to assess the implementation of Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 in South Tangerang City and find an increase in social welfare with the implementation of the PSAP No. 2. Research using qualitative descriptive methods. The data obtained through documentation and interviews. Results of research conducted through the application of 56 evaluation items PSAP No. 2, there are 34 items (60.71%) are in accordance of which are reports of South Tangerang city budget has provided information on the overall budget and is useful in evaluating government performance, reports the realization also has provided information that the realization is implemented in accordance with the budget, although there is a change in its implementation; 1 item (1.78%) is not appropriate because there is no further explanation of budget changes in the notes to financial statements; 14 items (25%) has not been applied because it has not happened yet but already there are transactions related to policy on the matter, and 7 items (12.5%) could not be given the assessment because it can not obtain evidence supporting the claim. On the other hand, IPM South Tangerang increase from the year 2008 amounting to 74.80 to 75.01 in 2009. Thus, management of professional and accountable budget with reference to the PSAP number 2 for the statements of South Tangerang City budget was instrumental in helping the development process to improve the welfare of the society.

Keywords: Governmental Accounting Standards Board, budget realization report, public welfare, Human Development Index.

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembentukan Kota Tangerang Selatan merupakan aspirasi masyarakat setempat. Tujuan utamanya ialah supaya tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Pengelolaan daerah secara otonomi dan mandiri diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan, sehingga pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia bisa lebih optimal. Kunci sukses terletak pada kemampuan para pengelola yang menduduki birokrasi pemerintahan, mulai dari yang menduduki posisi tertinggi sampai yang terendah. Menjadi penyelenggara bukan hanya sekedar menyelenggarakan, namun harus benar-benar berorientasi pada penyelenggaraan yang berkualitas dan profesional. Pelaksanaan

¹ pembangunan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tangerang Selatan dapat dilakukan dengan mengintervensi pembangunan secara spesifik dan terkonsentrasi terhadap aspek-aspek paling penting yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Aspek tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dan daya beli (ekonomi). Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah pelayanan terhadap masyarakat, terutama yang terbelenggu persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan. Itulah esensi pembentukan daerah otonom baru.

Hari Senin Tanggal 19 Juli 2010, Tempointeraktif menyebutkan bahwa terdapat penyimpangan anggaran di Tangerang Selatan yang disebabkan oleh minimnya tenaga akuntansi. Berita tersebut menyebutkan bahwa Pejabat Walikota Tangerang Selatan, Eutik Suarta, mengakui terjadinya penyimpangan anggaran dalam ²laporan keuangan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 karena pemerintahan baru itu kekurangan tenaga akuntansi. Sebelumnya, BPK Banten menemukan penyimpangan dalam realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2009 sebesar Rp18,56 milyar. Total nilai penyimpangan sebesar Rp18,56 milyar yang terdiri atas temuan yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp529,15 juta, kekurangan penerimaan sebesar Rp24,98 juta dan temuan administrasi sebesar Rp18,01 milyar termasuk di dalamnya temuan kesalahan penganggaran belanja pemeliharaan jalan sebesar Rp15,52 ²milyar. Atas temuan itu BPK memberi penilaian wajar dengan pengecualian untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2009. Fenomena-fenomena tersebut menimbulkan dugaan adanya kekurangsesuaian penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Pemkot Tangsel dengan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2.

Undang-undang yang berfungsi menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan tersebut menetapkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen. ²Pada tahun 2005, KSAP telah menyusun draft SAP yang kemudian ditetapkan sebagai PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang di dalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pernyataan standar ini mengatur pelaporan realisasi anggaran untuk tujuan umum yaitu memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat

ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mengetahui kesesuaian penyusunan laporan realisasi anggaran dengan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran di Kota Tangerang Selatan, diperlukan evaluasi atas hasil dan proses kegiatan penganggaran. Yang dimaksud dengan hasil dan proses kegiatan penganggaran antara lain laporan realisasi anggaran, proses penyusunan anggaran, dan bukti-bukti pendukungnya. Mengingat pentingnya penerapan PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan karena belum pernah dilakukan penelitian terkait PSAP tersebut, maka sangat perlu untuk menganalisis tentang evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai suatu studi kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan fokus masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah LRA Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 2? Apakah terdapat hubungan antara penerapan PSAP Nomor 2 dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan? Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan atau pengembangan peraturan mengenai pelaksanaan laporan realisasi anggaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintahan Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditempatkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan pada sektor publik.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dalam suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan Kepres Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepres Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Kepres Nomor 84 Tahun 2004 tentang KSAP. Kepres tersebut menguatkan kedudukan KSAP yang telah dibentuk oleh menteri keuangan RI Nomor 308/KMK.012/2002 tentang KSAP pusat dan daerah tertanggal 13 Juni 2002.

Secara garis besar, SAP mengatur pengukuran (nilai yang dicatat), pengakuan (yang dicatat), dan pengungkapan (di mana dan bagaimana). Selanjutnya SAP terdiri dari sebelas PSAP, antara lain (SAP, 2005):

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;

7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut (PSAP No. 2):

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus/defisit

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Unsur-unsur dari LRA dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

a. Pendapatan	Rp xxx
b. Belanja	Rp xxx
c. Transfer	Rp xxx
d. Surplus (Defisit) = $(a - (b+c))$	Rp xxx
e. Pembiayaan (Neto)	Rp xxx
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran = $(d - f)$	Rp xxx

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesejahteraan Masyarakat/Sosial

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Sesuai dengan UU tersebut, maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pihak yang bertanggungjawab dalam memenuhi tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut adalah pemerintah yang dilaksanakan oleh menteri, dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh gubernur untuk tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

Pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, begitu pula penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang pelaksanaannya perlu diawasi agar tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut data IPM Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bappeda, IPM merupakan Indikator gabungan dari beberapa indikator, yaitu Indikator Kesehatan (Indeks Harapan Hidup), Indikator Pendidikan (Indeks Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah) dan Indikator Ekonomi (Daya Beli Penduduk / *Purchasing Power Parity* / PPP). Penghitungan IPM ini merupakan formula yang digunakan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu wilayah/negara dan mempublikasikannya dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Dibandingkan dengan indeks komposit lainnya, IPM merupakan indikator yang cukup baik, karena mencakup 3 (tiga) sektor pembangunan yang dominan dan memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jika suatu wilayah/negara memiliki kemajuan yang cukup berarti dalam tiga sektor tersebut maka secara otomatis SDM yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang sejalan dengan perkembangan tersebut. Angka IPM suatu daerah memperlihatkan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai nilai maksimum (100).

Bappeda juga menyebutkan formula yang digunakan untuk penghitungan IPM yaitu angka harapan hidup (e0), angka melek huruf (Lit), rata-rata lama sekolah (MYS) dan daya

beli (PPP), sesuai dengan standar baku komponen IPM yang dilakukan oleh UNDP. Dengan demikian, hasilnya dapat dibandingkan secara internasional, nasional dan daerah. Rasionalitas pemilihan komponen tersebut dibahas dalam laporan HDR oleh UNDP yang dipublikasikan setiap tahun sejak 1990.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan objek Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Tangerang Selatan tahun 2009 sedangkan satuan kasusnya adalah kesejahteraan masyarakat terkait kepatuhan penyusunan pelaporan realisasi anggaran tersebut.

Objek Penelitian

Objek studi kasus dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Riset dilakukan di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Tangerang Selatan. Waktu riset dilakukan pada jam kerja yaitu setiap hari Senin s.d hari Jumat, mulai tanggal 6 Juni 2011 s.d 12 September 2011.

Instrumen Penelitian

1. Pedoman evaluasi **Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran**, dengan indikator : a) Penyusunan laporan realisasi anggaran; b) Akuntansi pendapatan; c) Akuntansi belanja; d) Akuntansi surplus/defisit dan pembiayaan. Evaluasi dilakukan menggunakan tabel berisi daftar pernyataan dengan keempat indikator di atas yang disusun berdasarkan PSAP Nomor 2. Penilaian dilakukan dengan membandingkan indikator-indikator tersebut dengan pelaksanaannya di Pemkot Tangerang Selatan. Kategori penilaian dibagi menjadi 4, yaitu:

Tabel 1. Kategori Penilaian Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 2

No.	Kategori		Keterangan
1	S	Sesuai	LRA Kota Tangsel telah dilaksanakan sesuai dengan PSAP Nomor 2
2	TS	Tidak Sesuai	Pelaksanaan LRA Kota Tangsel tidak sesuai dengan PSAP Nomor 2
3	BT	Belum diterapkan	Transaksi terkait item PSAP Nomor 2 belum pernah terjadi, namun sudah ada kebijakan mengenai hal tersebut
4	TMN	Tidak Memberikan Penilaian	Transaksi terkait item PSAP Nomor 2 sudah terjadi, namun tidak diperoleh bukti pendukung mengenai hal tersebut

Sumber: rumusan peneliti

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan indikator : a) Kesehatan; b) Pendidikan; dan c) Daya beli. IPM yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 2.
Instrumen Operasional Analisis Determinan Pembangunan Manusia

No.	Rentang IPM	Kriteria	Skor
1	<50,0	Rendah	1
2	50,0 – 65,9	Menengah bawah	2
3	66,0 – 79,0	Menengah atas	3
4	>80,0	Tinggi	4

Sumber: BPS

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah data sekunder, antara lain: Laporan Realisasi Anggaran Kota Tangerang Selatan tahun 2009, Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Tangerang Selatan tahun 2009, Indeks Pembangunan Manusia Kota Tangerang Selatan tahun 2008 dan tahun 2009. Data sekunder tersebut bersumber dari DPPKAD dan Bappeda Kota Tangerang Selatan. Selain itu, diperlukan data primer yang berasal dari wawancara langsung dengan narasumber yang langsung menangani pelaporan realisasi anggaran untuk melengkapi pernyataan mengenai evaluasi ²penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Kota Tangerang Selatan dan memberikan alasan pemberian jawaban atas pernyataan tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik riset arsip. Menurut Arikunto (2002), riset arsip adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan jalan melihat kembali sumber tertulis yang lalu baik berupa angka atau keterangan (tulisan, paper, tempat, kertas atau orang). Riset arsip dilakukan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pendukung terhadap data secara keseluruhan agar diperoleh kesimpulan yang benar.

Teknik ² Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data untuk membentuk rangkuman inti agar penelitian lebih terfokus. Langkah selanjutnya adalah dengan menyusunnya dalam satuan-satuan dan kategorisasi, langkah terakhir adalah menafsirkan atau memberikan makna terhadap data.

Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2005), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Uji keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Uji kredibilitas

Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, menggunakan bahan referensi, dan *member check*. Perpanjangan pengamatan artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, dan melakukan wawancara dengan sumber data. Menggunakan bahan referensi. Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. *Member check* adalah proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data.

b) Pengujian *Conformability*

Pengujian *conformability* dalam penelitian kualitatif disebut juga objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *conformability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar *conformability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Rencana ini berawal dari keinginan warga di wilayah selatan untuk mensejahterakan masyarakat. Wacana pembentukan kota otonom Tangerang Selatan (dahulu Cipasera) muncul sejak 1999. Namun, belum adanya kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang jumlah kecamatan yang akan tergabung, menghambat proses pembentukannya. Sebagian besar warga Kecamatan Ciputat, Pamulang, Serpong, Cisauk, dan Pondok Aren menginginkan lepas dari Kabupaten Tangerang. Untuk mewujudkan keinginan itu, pada 19 November 2000, dibentuk Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom (KPPDO) Kota Cipasera. Pada 2002, para aktivis KPPDO melakukan kajian awal untuk mendata kelayakan wilayah Cipasera menjadi sebuah kota otonom setingkat kotamadya yang memiliki luas 239.850 km persegi. Pada tahun 2000, jumlah penduduk yang tinggal di lima kecamatan itu hampir mencapai 942.194 (Pagedangan diikutkan), setara dengan 34,5% penduduk Kabupaten Tangerang.

Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan UU No.51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan. Secara administratif mempunyai 7 (tujuh) kecamatan dan 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dengan luas wilayah 147,79 ha, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang.
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

Hasil Uji kredibilitas

Uji kredibilitas data dilakukan dengan melakukan perpanjangan waktu pengamatan yang semula penelitian hanya dilakukan selama satu bulan, yaitu selama Bulan Juli saja, menjadi diperpanjang agar data yang diperoleh kredibel sehingga waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan lebih yaitu dari Bulan Juli sampai dengan Bulan September. Selain itu, penggunaan bahan referensi seperti beberapa artikel mengenai akuntansi pemerintahan dan

info seputar Kota Tangerang Selatan juga dilakukan untuk mendukung pembenaran data yang telah diperoleh. *Member check* juga terus dilakukan selama perpanjangan waktu penelitian dengan terus mengkonfirmasi kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari narasumber.

Hasil Uji *Conformability*

Uji *conformability* dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi dengan hasil wawancara persepsi kepada 30 responden yang merupakan pegawai keuangan di 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan mengenai ke 56 item penerapan PSAP Nomor 2 di kota tersebut. Ada beberapa item yang sesuai antara evaluasi dan persepsi dan ada juga beberapa yang belum sesuai antara keduanya, untuk lebih jelasnya hasil wawancara persepsi responden dapat dilihat dalam lampiran 4.

2 Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan setelah dilakukan evaluasi, dari 56 item penerapan PSAP Nomor 2, terdapat 34 item (60,71%) telah sesuai, 1 item (1,78%) tidak sesuai, 14 item (25%) belum diterapkan karena belum ada transaksi terkait, dan 7 item (12,5%) tidak dapat diberikan penilaian karena tidak diperoleh bukti pendukung mengenai pernyataan tersebut.

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dari 18 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2 untuk indikator penyusunan laporan realisasi anggaran, 14 item (77,78%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2, 1 item (5,55%) tidak sesuai, dan 3 item (16,7%) belum diterapkan karena belum ada transaksi terkait. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Hasil Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 2 Dengan Indikator Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

No.	Pertanyaan	Kriteria	Keterangan
1	LRA sudah menyajikan realisasi pendapatan	S	Lampiran 3, kolom 5, baris ke-1 s.d 22
2	LRA sudah menyajikan realisasi belanja	S	Lampiran 3, kolom 5, baris ke-23 s.d 44
3	LRA sudah menyajikan realisasi transfer	S	Lampiran 3, kolom 5, baris ke-7 s.d 17 dan baris ke-40
4	LRA sudah menyajikan surplus/defisit	S	Lampiran 3, baris ke-46
5	LRA sudah menyajikan informasi pembiayaan	S	Lampiran 3, baris ke-46 s.d 59

6	LRA sudah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding	S	Lampiran 3, kolom 5 dan 6
7	LRA sudah memberikan informasi bahwa realisasi dilaksanakan sesuai dengan anggaran/APBD	S	Lampiran 3, kolom 5 dan 6
8	LRA disajikan sekurang- kurangnya sekali dalam setahun	S	Lampiran 3
9	LRA disajikan tepat waktu yaitu selambat- lambatya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	S	LRA Tangsel disajikan pada 31 Maret 2010, dan terbit setelah dilakukan audit BPK yaitu pada Mei 2010
10	Penjelasan yang dibutuhkan mengenai LRA telah dirinci lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan	S	Catatan atas laporan keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 12 s.d 16
11	LRA telah menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh dan berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran	S	Catatan atas laporan keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 12 s.d 16
12	LRA telah menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing dapat diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	S	Lampiran 3
13	LRA telah mengidentifikasi secara jelas dan diulang informasi yang dianggap perlu, seperti nama entitas pelaporan, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, satuan angka yang digunakan	S	Lampiran 3
14	Jika tidak menggunakan periode pelaporan selama satu tahun, alasannya disertakan dalam catatan atas laporan keuangan	BT	
15	Jika tanggal laporan berubah dan LRA tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, informasi mengenai fakta bahwa jumlah- jumlah komparatif dalam LRA dan catatan terkait tidak dapat diperbandingkan, akan diungkapkan	BT	

Sumber: Hasil Perbandingan Pedoman Evaluasi Penerapan PSAP No. 2 dengan Bukti Pelaksanaannya

Tabel 3.
Hasil Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 2 Dengan Indikator Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
(lanjutan)

No.	Pertanyaan	Kriteria	Keterangan
16	Jika ada hal- hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal atau moneter, dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan	TS	Catatan atas laporan keuangan tangsel tahun 2009, halaman 12 dan 13 tidak ada penjelasan mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja
17	Jika terjadi perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan	S	Catatan atas laporan keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 15
18	Transaksi dalam mata uang asing, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada saat transaksi	BT	Kebijakan mengenai hal ini terdapat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 30

Sumber: Hasil Perbandingan Pedoman Evaluasi Penerapan PSAP No. 2 dengan Bukti Pelaksanaannya

Akuntansi Pendapatan

Dari 10 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2 untuk indikator akuntansi pendapatan, 5 item (50%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2, 3 item (30%) belum diterapkan karena belum ada transaksi terkait, dan 2 item tidak dapat diberikan penilaian karena tidak diperoleh bukti pendukung mengenai pernyataan tersebut. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.
Hasil Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 2 Dengan Indikator Akuntansi Pendapatan

No.	Pertanyaan	Kriteria	Keterangan
1	Pendapatan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci	S	Lampiran 3, baris ke-1 s.d 22
2	Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	TMN	Sesuai namun tanpa bukti. Catatan atas laporan keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 21
3	Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	TMN	Catatan atas laporan keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 22 menyebutkan bahwa transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan
4	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan telah diungkapkan sedemikian rupa pada	S	Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 56-60

catatan atas laporan keuangan				
5	Pendapatan pada LRA telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	S		Lampiran 3, baris ke-1 s.d 22; dan Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 19-20
6	Akuntansi pendapatan pada Pemerintah Kota Tangsel menggunakan asas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya	S		Lampiran 3, baris ke-1 s.d 44
7	Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum	BT		Kebijakan mengenai BLU telah terdapat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 21
8	Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama	BT		Pemerintah Kota Tangsel baru melakukan penarikan pajak pada tahun 2009, belum ada restitusi
9	Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut	BT		Kebijakan mengenai hal ini telah terdapat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 21

Sumber: Hasil Perbandingan Pedoman Evaluasi Penerapan PSAP No. 2 dengan Bukti Pelaksanaannya

Akuntansi Belanja

Dari 15 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2 untuk indikator akuntansi belanja, 10 item (66,67%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2, dan 5 item (30%) tidak dapat diberikan penilaian karena tidak diperoleh bukti pendukung mengenai pernyataan tersebut. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Hasil Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 2 Dengan Indikator Akuntansi Belanja

No.	Pertanyaan	Kriteria	Keterangan
1	Transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	TMN	-
2	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja)	S	Lampiran 3, baris ke-23 s.d 44; dan Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 22-25
3	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah terdapat belanja pegawai	S	Lampiran 3, baris ke-25

4	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah terdapat belanja barang	S	Lampiran 3, baris ke-26
5	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah terdapat belanja modal	S	Lampiran 3, baris ke-31
6	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah terdapat (belanja) bunga	S	Lampiran 3, baris ke-27
7	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah terdapat (belanja) subsidi	S	Lampiran 3, baris ke-28
8	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah terdapat (belanja) hibah	S	Lampiran 3, baris ke-29
9	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah terdapat belanja tak terduga	S	Lampiran 3, baris ke-38
10	Belanja yang telah dikeluarkan dicantumkan secara terperinci	S	Lampiran 3, baris ke-23 s.d 44
11	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk belanja diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan	S	Catatan atas laporan keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 12 s.d 60-62
12	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah	TMN	Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 22 dan 26
13	Pengeluaran khusus yang melalui bendahara, pengakuan pengeluarannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan	TMN	Pemerintah Kota Tangsel memiliki 2 cara pengeluaran dana, yaitu pengeluaran untuk persediaan (SPM-UP) yang melalui bendahara, dan pengeluaran langsung (SPM-LS)
14	Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama	TMN	Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 26, paragraf 5
15	Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berikutnya dibukukan dalam pendapatan lain- lain	TMN	Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 26, paragraf 5

Sumber: Hasil Perbandingan Pedoman Evaluasi Penerapan PSAP No. 2 dengan Bukti Pelaksanaannya

Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan

Dari 13 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2 untuk indikator akuntansi surplus/defisit dan pembiayaan, 5 item (38,46%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2, dan 8 item (61,53%) belum diterapkan karena belum ada transaksi terkait. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.
Hasil Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 2 Dengan Indikator Akuntansi Surplus/ Defisit dan
Pembiayaan

No.	Pertanyaan	Kriteria	Keterangan
1	Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan, dicatat dalam pos Surplus/Defisit	S	Lampiran 3, baris ke-45; dan Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Tangsel tahun 2009, halaman 62-63
2	Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	BT	-
3	Penerimaan pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Lampiran 3, baris ke-47 s.d 52
4	Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto	S	Lampiran 3, baris ke-58
5	Pengeluaran pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Lampiran 3, baris ke-53 s.d 57
6	Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	BT	-
7	Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto	BT	-
8	Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah	BT	-
9	Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan	BT	-
10	Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan	BT	-
11	Hasil- hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan yang dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah	BT	-
12	Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA	S	Lampiran 3, baris ke-59

Sumber: Hasil Perbandingan Pedoman Evaluasi Penerapan PSAP No. 2 dengan Bukti Pelaksanaannya

Kesejahteraan Masyarakat

Data IPM Kota Tangerang Selatan tahun 2009 yang diperoleh dari Bappeda menunjukkan adanya peningkatan IPM dari tahun 2008 yang merupakan angka perbaikan saat Kota Tangerang Selatan masih tergabung dengan Kabupaten Tangerang. Peningkatan yang ditunjukkan oleh angka IPM dari tahun 2008 ke tahun 2009 memang tidak terlalu

drastis. Dalam aspek kesehatan untuk indikator AHH Kota Tangerang Selatan pada tahun 2008 adalah sebesar 68,40 meningkat pada tahun 2009 menjadi 68,43. Dalam aspek pendidikan untuk indikator AMH Kota Tangerang Selatan pada tahun 2008 adalah sebesar 98,12 meningkat pada tahun 2009 menjadi 98,14, dan untuk indikator RLS Kota Tangerang Selatan pada tahun 2008 adalah sebesar 9,94 meningkat pada tahun 2009 menjadi 9,95. Untuk aspek daya beli, pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan pada Kota Tangerang Selatan tahun 2008 adalah sebesar 639,4 meningkat pada tahun 2009 menjadi 641,72. Sehingga angka IPM Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan pada tahun 2008 adalah sebesar 74,80 meningkat pada tahun 2009 menjadi 75,01.

Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan masyarakat dilihat melalui IPM yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Perhitungan IPM dimulai pada tahun 2009 karena Kota Tangerang Selatan dibentuk pada akhir tahun 2008. Angka IPM Tangerang Selatan untuk tahun 2008 merupakan angka perbaikan saat Kota Tangerang Selatan masih tergabung dengan Kabupaten Tangerang (Bappeda, 2009).

A. Angka Harapan Hidup

Indikator harapan hidup digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Kota Tangerang Selatan mempunyai perkiraan Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2009 sebesar 68,43 tahun, lebih tinggi dari Kabupaten Tangerang sebagai daerah induk yang nilai AHH-nya sebesar 65,61 tahun serta Propinsi Banten yang pada tahun 2009 mencapai 64,75 tahun, namun masih lebih rendah dari Cilegon yang mencapai 68,53 tahun. AHH sebesar 68,43 tahun artinya rata-rata bayi yang baru dilahirkan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 akan menjalani hidup selama 68,43 tahun meningkat dari tahun 2008 yang AHH-nya sebesar 68,40 tahun.

Selanjutnya dari AHH dapat diturunkan untuk mendapatkan indeks harapan hidup yang telah dicapai dibanding dengan kondisi “ideal” yang diharapkan sesuai nilai standar UNDP yaitu 85 tahun (100%). Berdasarkan hasil perhitungan yang menggunakan rumus:

$$\text{Indeks } X(i) = (X(i) - X(i)_{\min}) / X(i)_{\max} - X(i)_{\min})$$

$$\text{Indeks AHH 2008} = (68,40 - 25) / (85 - 25) = \mathbf{72,33}$$

$$\text{Indeks AHH 2009} = (68,43 - 25) / (85 - 25) = \mathbf{72,38}$$

diketahui indeks harapan hidup masyarakat di Kota Tangerang Selatan tahun 2008 adalah 72,33 meningkat menjadi 72,38 pada tahun 2009.

B. Melek Huruf (Lit) dan Lama Sekolah (MYS)

Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 terdapat 1,86 % penduduk (usia 15 tahun keatas) yang buta huruf, terlihat dari Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 98,14%. Jika dibandingkan dengan seluruh Kab/Kota di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan menempati peringkat ketiga setelah Kota Cilegon (98,71%). AMH Kota Tangerang Selatan juga berada diatas AMH Propinsi Banten yang mencapai 95,95%. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tangerang Selatan tahun 2009 mencapai 9,95 tahun. Jika dilihat dari RLS seluruh Kab/Kota sePropinsi Banten, RLS tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. RLS Kabupaten Tangerang setelah terpisah dengan Kota Tangerang Selatan (8,93 tahun) menempati urutan keempat setelah Kota Cilegon (9,66 tahun), dan yang terendah adalah kabupaten Lebak (6,22 tahun), sedangkan RLS Propinsi Banten hanya 8,15 tahun. RLS dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan penduduk untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan fasilitas serta prasarana gedung sekolah, dan yang lebih penting adalah program kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Indikator pendidikan ini dapat menghasilkan angka indeks melek huruf, di mana indeks melek huruf Kota Tangerang Selatan mencapai 98,14 dan indeks RLS baru mencapai 66,33 yang berarti bahwa rata-rata pencapaian penduduk Kota Tangerang Selatan yang mengikuti pendidikan formal hanya 66,33% dari seluruh lama pendidikan yang mestinya dijalani yaitu 15 tahun. Dari perhitungan indeks AMH dan RLS didapatkan angka indeks pendidikan dengan rumus:

$$\text{Indeks Pendidikan} = 2/3 \text{ Indeks MH} + 1/3 \text{ Indeks RLS}$$

$$= 2/3 (98,14) + 1/3 (66,33)$$

$$= \mathbf{87,54}$$

Dari Tabel 4.01 Indeks Pendidikan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 sedikit meningkat dibanding dengan tahun 2008 namun cukup signifikan lebih besar dibanding tahun 2006-2007 pada kondisi masih tergabung dengan Kabupaten Tangerang, yaitu meningkat sebesar 5,59%.

Tabel 7.
Indeks Pencapaian Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun 2006-2009 (Tahun 2006-2007 masih Kabupaten Tangerang)

No.	Indikator	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Angka Melek Huruf	94,7	95,3	98,12	98,14
2.	Indeks AMH	94,7	95,3	98,12	98,14
3.	Rata- rata lama sekolah	8,9	8,9	9,94	9,95
4.	Indeks RLS	59,3	59,3	66,27	66,33
Indeks Pendidikan		82,9	83,3	87,50	87,54
Sumber: BPS					

C. Daya Beli Penduduk

Konsumsi perkapita riil setahun untuk Kota Tangerang Selatan meningkat dari tahun 2008 sekitar 639,40 ribu rupiah menjadi sekitar 641,72 ribu rupiah pada tahun 2009, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Propinsi Banten menempati peringkat kedua setelah Cilegon dengan nilai 641,88 ribu rupiah serta berada di atas nilai rata-rata Propinsi Banten sendiri yaitu sebesar 627,63 ribu rupiah. Kemampuan daya beli masyarakat Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 638 ribu rupiah. Pembangunan yang cukup pesat di Kota Tangerang Selatan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, hal ini ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 sekitar 5,54%, sedikit berkurang dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,07%. Angka kemiskinan Kota Tangerang Selatan 2009 lebih rendah dari angka kemiskinan Propinsi Banten yang mencapai 7,46% namun masih lebih besar dibandingkan Kota Cilegon (4,14%).

Tabel 8.
 Daya Beli, Indeks Daya Beli dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Propinsi Banten
 Tahun 2009

No.	Kabupaten / Kota	Daya Beli (000 Rp)	Indeks Daya Beli (persen)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pandeglang	625,06	61,25	12,01
2.	Lebak	627,49	61,82	10,63
3.	Tangerang	632,77	63,04	6,55
4.	Serang	630,08	62,41	5,80
5.	Kota Tangerang	640,27	64,77	6,42
6.	Kota Cilegon	641,88	65,14	4,14
7.	Kota Serang	635,34	63,63	6,19
8.	Kota Tangerang Selatan	641,72	65,10	5,54
Propinsi Banten		627,63	61,85	7,46

Sumber : BPS, Susenas 2009

Dari tabel 4.11 terlihat bahwa secara umum persentase indeks daya beli masyarakat Kota Tangerang Selatan maupun rata-rata di Propinsi Banten masih cukup rendah berada pada kisaran 60 – 65 persen dari nilai standar daya beli yang direkomendasikan UNDP yaitu Rp 732.720.

D. Indeks Pembangunan Manusia

Hasil perhitungan ketiga komponen IPM tersebut menunjukkan posisi IPM Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah baru setelah dimekarkan dari Kabupaten Tangerang mempunyai nilai IPM sebesar 75,01 berada pada posisi pertama dari kabupaten/kota sePropinsi Banten, peringkat berikutnya adalah Kota Cilegon sebesar 74,99 dan Kota Tangerang 74,89, Kabupaten Tangerang menempati urutan ke empat dengan nilai IPM 71,45 disusul Kota Serang 69,99 sedangkan nilai IPM terendah masih berada di Kabupaten Lebak 67,45, dan untuk nilai IPM Propinsi Banten mencapai 70,06 berada pada peringkat 23 nasional. Jika ukuran menengah menurut skala internasional dibagi lagi menjadi kelas “menengah atas” dan “menengah bawah” maka secara umum seluruh kabupaten/kota di Propinsi Banten termasuk Kota Tangerang Selatan masuk dalam kategori “menengah atas” dengan nilai IPM antara 66,00 – 79,99.

IPM Kota Tangerang Selatan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)$$

Dimana: X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Angka Pendidikan

X3 = Indeks Konsumsi per kapita yang disesuaikan

Diketahui:

Indikator IPM	Tahun 2008	Tahun 2009
Indeks Harapan Hidup	72,33	72,38
Indeks Angka Pendidikan	87,50	87,54
Indeks Daya Beli	64,57	65,10

Jawaban:

$$\begin{aligned}\text{IPM Tangerang Selatan 2008} &= 1/3 (72,33 + 87,50 + 64,57) \\ &= 74,80 \\ \text{IPM Tangerang Selatan 2009} &= 1/3 (72,38 + 87,54 + 65,10) \\ &= 75,01\end{aligned}$$

Jadi, Kota Tangerang Selatan memperoleh IPM sebesar 74,80 pada tahun 2008 meningkat menjadi 75,01 masih dengan predikat Menengah ke Atas.

2 Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi, kesesuaian penyusunan dan pelaksanaan LRA Kota Tangerang Selatan dengan PSAP Nomor 2 adalah sebesar 60,71%. Artinya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah berpedoman pada 60,71% dari PSAP Nomor 2 dalam melaksanakan pelaporan realisasi anggarannya. Di sisi lain, IPM Kota Tangerang Selatan tahun 2009 menunjukkan angka yang tinggi yaitu 75,01 meningkat dari tahun 2008 (yang angka IPM-nya sebesar 74,80) sebelum Tangerang Selatan menerapkan PSAP Nomor 2 secara otonom karena belum memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang. Bila dilihat dari angka persentase penerapan dan selisih kenaikan IPM dari tahun 2008 ke 2009 menunjukkan bahwa dengan hanya menerapkan 60,71% dari PSAP Nomor 2, IPM sudah mengalami peningkatan.

Jadi, pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel dengan berpedoman pada PSAP Nomor 2 dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat Tangerang Selatan yang antara lain diwujudkan dengan optimalnya penyelenggaraan program pemerintah untuk mengadakan pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, sehingga daya beli masyarakat juga akan baik, seperti yang terangkum dalam IPM Kota Tangerang Selatan.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesesuaian penyusunan dan pelaksanaan LRA Kota Tangerang Selatan dengan PSAP Nomor 2 adalah sebesar 60,71% sedangkan IPM Kota

Tangerang Selatan tahun 2009 menunjukkan angka yang tinggi yaitu 75,01 meningkat dari tahun 2008 yaitu sebesar 74,80 sebelum Tangerang Selatan menerapkan PSAP Nomor 2 secara otonom karena belum memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang. Jadi, pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel dengan berpedoman pada PSAP Nomor 2 dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan seperti yang terangkum dalam IPM Kota Tangerang Selatan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terbatasnya data yang dapat diperoleh, seperti bukti pendukung mengenai transaksi terkait pelaporan realisasi anggaran, sehingga penerapan PSAP Nomor 2 tidak dapat dinilai secara optimal dan menyeluruh. Sebaiknya penjelasan mengenai baik perubahan anggaran maupun perubahan pelaksanaan anggaran yang menyebabkan berubahnya besar realisasi agar diungkapkan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan; untu peneliti selanjutnya agar melakukan pembobotan antara item pernyataan SAP berdasarkan tingkat pentingnya diterapkan agar dapat diketahui total penilaian ideal dari seluruh item.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2009). *Indeks Pembangunan Manusia Kota Tangerang Selatan 2009*. Tangerang Selatan: Bappeda.
- Badan Pusat Statistik-Jakarta (2006-2007). Indeks Pembangunan Manusia. Diakses dari <http://daps.bps.go.id/File%20Pub/Publikasi%20IPM.pdf>. [02 Juli 2011].
- Bappeda (2009). Sekilas Tentang Tangerang Selatan. Diakses dari <http://bappeda.tangerangselatankota.go.id/>. [20 Juni 2011].
- BPPK (2011). [Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik- Akuntansi Sektor Publik](http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050577/jurnal-akuntansi-pemerintah/pewujudan-transparansi-dan-akuntabilitas-publik-melalui-akuntansi-sektor-publik/akuntansi-sektor-publik.html). Diakses dari <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050577/jurnal-akuntansi-pemerintah/pewujudan-transparansi-dan-akuntabilitas-publik-melalui-akuntansi-sektor-publik/akuntansi-sektor-publik.html>. [26 Juli 2011].
- Faisal S. (2001). *Format- Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fitriadi (2009). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No.1. (Studi Kasus Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kampar Tahun 2006). [Skripsi]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi ketiga.
- Indonesia (2005). Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 24 Tahun 2005. TLN No.4503.

- Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 71 Tahun 2010. TLN No.5165.
- Indonesia (2004). Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004. TLN No.4437.
- Indonesia (2009). Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial. UU Nomor 11 Tahun 2009. TLN No.4967.
- Indonesia (2003). Undang-Undang Tentang Keuangan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003. TLN No.4286.
- Indonesia (2004). Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004. LN No.5.
- Joniansyah (2010, Juli, 19). Penyimpangan Anggaran di Tangerang Selatan Karena Minim Tenaga Akuntansi. Diakses dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2010/07/19/brk.20100719-264467.id.html>. [20 Juni 2011].
- Kompasiana (2011). Penelitian Kualitatif. Diakses dari <http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/11/penelitian-kualitatif/>. [01 Agustus 2011].
- Mahmudi (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nordiawan, D., Iswahyudi, S. P., & Maulidah, R. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (2010). Profil Kota Tangerang Selatan. Diakses dari <http://bagianpemerintahantangsels.blogspot.com/2010/01/profil-kota-tangerang-selatan-tahun.html>. [20 Juni 2011].
- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (2009). Bab I: Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan. Diakses dari <http://pemdatanangerangselatan.blogspot.com/>. [20 Juni 2011].
- Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (2006). KSAP.
- Sesunan, A. S. (2008). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2000- 2005. [Tesis]. Lampung: Universitas Lampung.
- Sugiyono (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.
- UNDP (2005). Indonesia: Indeks Pembangunan Manusia. Diakses dari <http://www.newsindo.com/beasiswa/undp1.pdf>. [31 Juli 2011].
- Website Resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan (2011). Sejarah Kota Tangerang Selatan. Diakses dari <http://www.tangerangselatankota.go.id/>. [20 Juni 2011].

HUBUNGAN PENERAPAN PSAP NOMOR 2 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN)

ORIGINALITY REPORT

11%	11%	0%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source	6%
2	eprints.ums.ac.id Internet Source	5%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 5%
Exclude bibliography	On		